

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang jasa serta pembagian itu untuk keperluan konsumsi. Dengan demikian obyek kajian ekonomi adalah perubahan atau perilaku manusia yang berkaitan dengan fungsi produksi, distribusi dan konsumsi. (Mubyarto, 2002:18).

Agama, baik Islam maupun non Islam, pada *essensinya* merupakan panduan atau bimbingan moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah atau hukum (*syari'ah*) dan budi pekerti luhur (*akhlak al karimah*). (A. Ghufuran Mas'adi, 2002

: 2)

Manusia dalam pergaulan hidup mempunyai kepentingan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban, kedua kewajiban diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain, sehingga keduanya mempunyai keseimbangan hubungan antara hak dan kewajiban. Hal tersebut diatur dalam aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan (*konfrontasi*) kepentingan dari berbagai pihak aturan-aturan (hukum) yang mengatur hubungan manusia dengan

yang lainnya, dalam kaitannya dengan duniawi dalam pergaulan sosial dengan istilah muamalah. (Hendi Suhendi, 2002 : 2)

Allah SWT, menciptakan manusia sebagai makhluk budaya, yakni menghajatkan kepada orang lain guna diajak tukar-menukar manfaat dalam segala manfaat bidang kebutuhan, baik dengan jalan perdagangan, bisnis, sewa- menyewa, pertanian, perusahaan, maupun dengan jalan yang lain, yang menyebabkan sesama manusia saling mengenal, menolong dan mempersatukan mereka dengan pekerjaan yang dapat menimbulkan manfaat secara umum atau khusus.

Ajaran Islam yang mengatur fiqh atau ushul al-fiqh disebut dengan syari'ah. Sesuai dengan aspek yang diaturnya, syari'ah ini terbagi dua, yakni ibadah dan muamalah. Ibadah adalah syari'ah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah adalah syari'ah yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Pada gilirannya, kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan sesama manusia, ia bukan merupakan bagian dari akidah, akhlak, dan ibadah, melainkan bagian integral dari muamalah. (A. Djazuli dan Yanwari, 2002 : 17). Masalah muamalah senantiasa tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia sebagai makhluk dinamis, kreatif, akan tetapi perkembangan dan pertumbuhan tersebut perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup.

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan muamalah seringkali menimbulkan kegiatan muamalah tidak sah dan jauh dari kebenaran yang telah disyariatkan. Hal tersebut disebabkan karena tidak sedikit kaum muslimin

mengabaikan dan melalaikan aspek ini sehingga tidak peduli kalau mereka memakan barang haram sekalipun usaha mereka setiap hari semakin meningkat dan menguntungkan.

Hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak muamalah (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (*al-Qur'an dan al-Hadits*) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong. Menghutangi atau memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengembalian yang sama adalah sunnah, karena mengandung unsur tolong menolong, menghilangkan kesulitan orang lain ini termasuk sunnah-sunnah muakad.

Memberi kemudahan dengan hutang jika penghutang tidak sedang *madharat* hukumnya sunnah dan jika dalam keadaan *madharat* hukumnya wajib. Dalam Islam, orang kaya harus membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT dengan cara membantu orang yang dalam kesulitan, tetapi pada kenyataannya ada orang kaya atau orang yang sudah merasa cukup belum bisa menjalankan syariat agama. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mengindahkan terhadap pemahaman agama yang telah mereka anut sejak dulu.

Di Pasar Cilegon Kota Cilegon banyak pedagang yang melakukan transaksi hutang piutang uang dengan pembayaran menggunakan standar harga emas secara diangsur, dengan tempo ditentukan, kemudian waktu jatuh tempo pembayaran dilipatgandakan. Para penghutang antara lain adalah Bapak Rohmani, Ibu Jumanah, Ibu Jerinah dan Ibu Sunawati. Mereka meminjam uang tersebut kepada Ibu Hj. Sunawiyah secara *financial* taraf hidupnya sudah mapan

dibandingkan dengan para peminjam yang tarap hidupnya kurang mampu.
(Wawancara dengan Peminjam, tanggal 12-02-2010)

Para peminjam biasanya meminjam untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif, tetapi terkadang ada juga yang meminjam untuk kebutuhan produktif yaitu modal usaha, menanamkan dan mengembangkan. Adapun yang meminjam untuk kebutuhan produktif yaitu Bapak Rohmani, Ibu Jumanah, Ibu Jerinah dan Ibu Sunawati. Mereka hutang uang kepada Ibu Hj. Sunawiyah dengan harga emas yang berlaku pada saat terjadinya akad, seperti Bapak Rohmani yang meminjam uang Rp. 1.000.000 seharga 1 gram emas saat akad senilai Rp. 400.000,-/gram maka terjadi kenaikan emas Rp. 50.000 pembayaran akan naik pula menjadi Rp. 450.000. dan disyaratkan pula jika emas itu turun maka ada kesepakatan bersama. (Wawancara dengan Peminjam, tanggal 15-02-2010)

Selain itu, pembayaran akan ditambah dengan penambahan beban sebesar 20% dari harga emas. Namun jika harga emasnya turun, hutang tetap harus dibayarkan hanya pada penambahan 20% akan berkurang sebagai kosekuensi logis dari turunnya harga emas.

Dari pelaksanaan hutang piutang tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang dirugikan oleh karena kemungkinan timbulnya penyesalan salah satu di antara kedua belah pihak yang melakukan hutang piutang. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam skripsi dengan judul:

Pembayaran Hutang Piutang dengan Menggunakan Standar Harga Emas di Pasar Cilegon Kota Cilegon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akad hutang piutang dengan pembayaran menggunakan standar harga emas secara diangsur di kalangan pedagang di Pasar Cilegon Kota Cilegon?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang pembayaran hutang piutang dengan menggunakan standar harga emas secara diangsur di kalangan pedagang di Pasar Cilegon Kota Cilegon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad hutang piutang dengan pembayaran menggunakan standar harga emas secara diangsur di kalangan pedagang di Pasar Cilegon Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah tentang pembayaran hutang piutang dengan menggunakan standar harga emas secara diangsur di kalangan pedagang di Pasar Cilegon Kota Cilegon.

D. Kerangka Pemikiran

Di dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang piutang. Sebab di antara manusia ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula

yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman.

Dalam ajaran Islam, hutang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk *ekstra* hati-hati dalam menerapkannya. Karena hutang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan sebaliknya juga menjerumuskan seseorang ke dalam neraka.

Manusia adalah makhluk yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam kehidupan di dunia ini. Pendorong bagi kebutuhan dan keinginan itu manusia terpaksa melakukan kerja sama dan seringkali harus mengorbankan sebagian keinginannya, atau mengantarkan menetapkan prioritas dalam melakukan pilihan. Namun ada juga manusia yang sukar mengendalikan keinginannya sehingga ia condong untuk menganiaya baik sesama manusia atau makhluk yang lain. (M. Quraish Shihab, 1996 : 83)

Konsekwensi dari hubungan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban baik antar komunitas maupun antar individu. Islam telah mengatur hubungan ini melalui tatanan hukum muamalah, yang meliputi pencukupan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan *primer*, *sekunder* dan *tertier*. Hal ini disimbolkan dalam al-Qur'an dengan prinsip tolong menolong dalam kebaikan yang didasari dengan keimanan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 2:

”.... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....” (Soenarjo, dkk., 2002 : 107).

Ayat di atas menunjukkan bahwa prinsip *ta'awanu 'ala al-biri wa al-taqwa*, merupakan salah satu keadilan serta pemerataan taraf kesejahteraan kehidupan dalam masyarakat, di samping memberikan daya gerak terhadap para pelaku ekonomi untuk mewujudkan dan menciptakan gerak, baik dalam bentuk kerja sama atau pendistribusian harta yang lebih jelas bagi kepentingan sosial.

Prinsip *ta'awanu 'ala al-birri wa al-tawqa* juga mencakup aspek material, yang sangat dibutuhkan oleh orang yang kurang mampu untuk meminta pertolongan kepada orang kaya. Aspek material ini antara lain memberikan sebagian harta kepada orang miskin sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 19:

“..... Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagia.....” (Soenarjo, dkk., 2002 : 522).

Penjelasan ayat menunjuk bahwa hak orang miskin bukan hanya sebagian dari harta orang kaya, tetapi juga untuk menghilangkan kesusahan dan kemudahan mereka mengembangkan usaha melalui pinjaman. Bukan untuk mengambil keuntungan dan bukan pula suatu cara untuk mengeksploitir, hal ini berhubungan dengan utang piutang.

Hutang piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-Qardh*. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqh dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*. (A. Ghufron Mas'adi, 2002 : 169).

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* (2002 : 92). Hutang piutang/pinjam meminjam adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti.

Lebih lanjut Hendi Suhendi mengatakan bahwa rukun pinjam meminjam atau hutang piutang adalah sebagai berikut:

1. Kalimat menghutangkan (*lafazh*), seperti seseorang berkata: “saya hutangkan benda ini kepada kamu” dan menerima, berkata: “saya mengaku berhutang benda atau barang kepada kamu”, adapun syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.
2. *Mu'ir* yaitu orang yang menghutangkan (berpiutang) dan *musta'mir* yaitu orang menerima hutang, syarat bagi *mu'ir* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah:
 - a. Baligh, maka batal *'ariyah* yang dilakukan anak kecil atau *shabiy*.
 - b. Berakal, maka batal *'ariyah* yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila.
 - c. Orang tersebut tidak *dimahjur* (di bawah *curatelle*), maka tidak sah *'ariyah* yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah perlindungan (*curatelle*), seperti pemboros.
3. Benda yang dihutangkan, pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, yaitu:
 - a. Bawa materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *'ariyah* yang materinya tidak digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.
 - b. Bahwa pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal *'ariyah* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara', seperti meminjam benda-benda najis.

Hutang piutang dalam kehidupan umat manusia adalah sesuatu yang wajar, bahkan merupakan keniscayaan. Bukan saja hutang antara manusia, hubungan manusia dengan Allah pun nyaris digambarkan dengan hubungan hutang piutang. (M. Quraish Shihab, 1996 : 262).

Penempatan uraian tentang hutang piutang setelah anjuran dan larangan, mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infak di jalan Allah pengejawantahan dari rasa kasih sayang yang mumi. Selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan dari kekejaman dan kekerasan hati. Dengan perintah menulis hutang piutang yang dapat memelihara harta dari kehilangan, tercermin keadilan yang didambakan Al-Qur'an, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat mumi yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh yang melakukan riba. (M. Quraish Shihab, 1996 : 263).

Riba (*usury* atau *interest*, bhs. Inggris) yang berasal dari bahasa arab ialah tambahan (*ziyadah*, Arab/*addition*, Inggris), yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Definisi riba adalah kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan, yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Riba dalam arti bahasa ialah tambahan, yang dimaksud riba adalah hutang piutang atau pinjam meminjam uang atau barang dengan syarat ada pungutan bunganya, status riba ini pada dasarnya banyak merugikan pada pinjaman atau menghutangnya. (Masyfuk Zubdi, 1997 : 120).

Larangan riba ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 130:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Soenarjo, dkk. 2002 : 67).

Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat keuntungan yang diperoleh pemilik modal bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya keuntungan yang didapat dengan mengeksploitir orang lain yang pada dasarnya lebih lemah dari padanya. Praktek semacam ini merugikan pengusaha kecil dan bawah dan sebaliknya menambah kekayaan bagi orang-orang yang kuat tanpa menanggung resiko apapun. (PINBUK Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, tt. : 10).

Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua konteks dalam pinjaman konteks tijarah (kerja usaha) dan *ta'awun* (tolong menolong), keduanya harus dipahami secara proporsional. Memungut keuntungan atau manfaat atas pinjaman terhadap orang yang seharusnya ditolong (fakir miskin) inilah praktek riba.

Riba ada tiga macam:

1. *Riba Nasi'ah* (penambahan atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan barang kontan atas hutang piutang). Dan *riba al-yad* ini termasuk dalam katagorinya.
2. *Riba al-Fadhal* (penambahan pada salah satu dari benda yang ditukarkan dalam jual beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan barang.). Dan *riba qardhi* adalah penambahan yang waktunya diundur.
3. *Riba Dain* (riba ini disebut juga dengan *riba jahiliyah* sebab riba jenis inilah yang terjadi pada jaman jahiliyah). (A.Ghufron Mas'adi, 2002 : 159-161).

Salah satu bentuk muamalah yaitu hutang piutang (pinjam meminjam) terjadi di Pasar Cilegon akad hutang piutang (pinjam meminjam) uang dengan pembayaran menggunakan standar harga emas disebut *riba al-yad* termasuk di dalam *riba nasi'ah* dengan menambah yang dipungut sebagai imbalan atas penundaan waktu pembayaran.

Jika dilihat dari segi hutang piutang tersebut, bisa mendatangkan madharat yaitu akan terjadinya kerugian pada salah pihak, penghutang, dilihat dari harga semula tanpa diperhitungkan. Oleh karena itu, apabila transaksi tersebut merugikan salah satu pihak, dapat digolongkan kepada akad *ikrah* dan *gharar*, karena dalam proses transaksi tanpa diperhatikan kelebihan ketika meminjam uang dihargai dengan emas karena harga emas bisa naik dan turun. Sementara dalam aturan hukum Islam suatu benda yang akan dipinjam (dihutang) harus jelas dari kesepakatan karena bisa menimbulkan *riba*.

Aspek *riba* dalam hutang piutang sangat erat hubungannya dengan akad oleh karena itu, hutang piutang yang dilakukan waktu perjanjian harus balik dan menghutangkan kedua belah pihak jika akad yang dilakukan melanggar ketentuan syara" maka tidak sah dalam kaidah *fiqh* disebutkan bahwa:

أَلْ مَنْ لَفِ الْعَقْدُ وَدَّ وَالْشُّرُوطُ الَّ صَّ
حَةُ الَّ مَّ الْبَاطِلُ لَهُ الَّ شُّرُوعُ

“Hukum pokok di dalam akad dan syarat-syaratnya adalah sah, kecuali ada sesuatu yang dibatalkan atau dilarang oleh Allah”. (A. Djazuli, 1997 : 51).

Kaidah di atas menjelaskan bahwa akad yang asalnya sah bisa menjadi batal, karena ada kecurangan-kecurangan yang dilarang oleh syara" begitu pula hutang piutang yang hukum asalnya sah menjadi haram, karena di dalam hutang

piutang tersebut terdapat riba yang jelas-jelas ada dalil yang mengharamkan oleh karena itu muncul kaidah fiqh sebagai berikut:

الْأَلْفُ لِفِ الْعَقْدِ وَالْمِائَةُ لِمَنْ حَتَّ بِهَا
عَلَى وَائِي دَلَّ الْبَطْلُ أَنْ لَمْ
يُحْلَلْ

“Asal sesuatu pokok dalam transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya ”. (A. Djazuli, 1997 : 52).

Standar yang telah ditetapkan mayoritas ulama tersebut merupakan standard yang jelas, baku dan bisa dilakukan oleh semua orang. Oleh karenanya, masyarakat Islam di dunia ini secara umum menggunakan standar ini, sehingga jarang terjadi sengketa di dalam menentukan jumlah nominal yang harus dikembalikan, karena nilai tersebut telah termaktub di dalam uang kertas.

Standar ini juga memudahkan masyarakat di dalam melakukan transaksi antara mereka. Mereka tidak usah payah setiap saat melihat naik turunnya nilai tukar uang kertas mereka dengan harga emas atau dengan harga *dollar* atau dengan harga mata uang lainnya. Pernyataan di atas secara sekilas memang masuk akal, tetapi kalau diteliti lebih mendalam ternyata sangat lemah dan menyisakan banyak problematika di masyarakat.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu untuk memperoleh gambaran tentang

pembayaran hutang piutang dengan menggunakan standar harga emas di mana kasus tersebut terjadi di Pasar Cilegon Kota Cilegon.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian adalah data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan:

- a. Proses akad hutang piutang dengan pembayaran menggunakan standar harga emas secara diangsur di kalangan pedagang di Pasar Cilegon.
- b. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang pembayaran hutang piutang uang dengan menggunakan standar harga emas secara diangsur di kalangan pedagang di Pasar Cilegon.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang memuat data-data mengenai masalah yang diteliti yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner kepada pedagang yang meminjam uang dengan pembayaran menggunakan standar harga emas secara diangsur di kalangan pedagang di pasar Cilegon Kota Cilegon.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen dan catatan-catatan perusahaan, literatur, artikel, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik penelitian, dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diambil dari berkas-berkas dan catatan tentang kegiatan hutang piutang di Pasar Cilegon Kota Cilegon.
- b. Wawancara, yaitu teknik yang menunjukkan seperangkat pertanyaan secara verbal kepada responden, yang pada gilirannya memberikan jawaban-jawaban secara verbal dari pihak yang terkait, dalam hal ini pedagang Pasar Cilegon.
- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berasal dari pustaka, yaitu buku-buku dan literatur yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas sebagai dasar teori yang digunakan.

6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, analisis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;

- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menganalisis data secara induktif dan deduktif

